

Dampak Pelanggaran dan Kebijakan Alih Fungsi Lahan menjadi Perkebunan Sawit terhadap Kerusakan Lingkungan di Kalimantan Barat tahun 2017-2021 = The Impact of the Violation and Policy on Land Conversion to Palm Oil Plantations on Environmental Damage at West Kalimantan on 2017-2021

Mentari Anakamiko, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920523827&lokasi=lokal>

Abstrak

Indonesia menjadi negara yang dikenal akan luas hutannya, salah satu penyumbang lahan hutan terbanyak berasal dari Provinsi Kalimantan Barat. Luasnya lahan hutan yang ada di Kalimantan Barat kemudian dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit untuk kepentingan investasi dan pertumbuhan pendapatan ekonomi di Indonesia, dimana dalam setahun potensi pajak turunan produk sawit di Kalbar dapat mencapai Rp1,5 triliun. Adanya pendayagunaan lahan hutan menjadi perkebunan sawit ini berada di bawah kebijakan dan izin oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun, implementasi yang ada dari kebijakan alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan sawit di Kalimantan Barat justru dijalankan secara berlebihan dalam porsi pengurangan lahan hutan yang lebih besar. Hal ini kemudian berdampak buruk dan merugikan lingkungan di Kalimantan Barat. Dengan demikian, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana dampak pelanggaran dan kebijakan alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan sawit pada kerusakan lingkungan di Kalimantan Barat selama periode tahun 2017 sampai 2021 dengan menggunakan metode penelitian secara kualitatif. Adapun, hasil temuan permasalahan ini akan dianalisis menggunakan teori Decentralized Forest Management yang dibahas oleh Larson pada tahun 2003.

.....Indonesia is a country known for its forest area, one of the largest contributors of forest land comes from the Province of West Kalimantan. The extent of forest land in West Kalimantan was then converted into oil palm plantations for investment purposes and economic income growth in Indonesia, where in a year the potential for palm oil product derivative taxes in West Kalimantan could reach IDR 1.5 trillion. The utilization of forest land into oil palm plantations is under policies and permits by the central government and regional governments. However, the existing implementation of the policy of converting forest land into oil palm plantations in West Kalimantan has actually been carried out excessively in a larger portion of forest land reduction. Then, has a bad impact and is detrimental to the environment in West Kalimantan. Thus, the authors conducted research to determine the impact of the policy on conversion of forest land to oil palm plantations on environmental damage in West Kalimantan during the period 2017 to 2021 using qualitative research methods. Later, the findings of this problem will be analyzed using the Decentralized Forest Management theory discussed by Larson in 2003.